**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270

Telepon (021) 2524845

Laman <http://www.lsf.go.id>, Pos-el (*e-mail*) sekretariat@lsf.go.id

KEPUTUSAN

SEKRETARIS LEMBAGA SENSOR FILM

NOMOR 1461/K1/WS.01.00/2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI, PENGADUAN MASYARAKAT,
DAN KONFLIK KEPENTINGAN (TPG-PMKK)
PADA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Birokrasi Bersih dan Melayani, maka perlu dibentuk Tim Pengendalian Gratifikasi pada Sekretariat Lembaga Sensor;
 - b. bahwa Tim Pengendalian Gratifikasi adalah suatu tim yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film tentang penetapan Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG) pada di Lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 48);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1738);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG) pada Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS LEMBAGA SENSOR FILM TENTANG TIM PENETAPAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TPG) PADA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM
- KESATU : Menetapkan Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG) pada Sekretariat Lembaga Sensor Film dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film ini.
- KEDUA : Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG) pada Sekretariat Lembaga Sensor Film sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyusun perangkat aturan pengendalian gratifikasi yang berlaku di Sekretariat Lembaga Sensor Film;
 - b. Melaksanakan diseminasi atas perangkat aturan pengendalian gratifikasi kepada unit kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;
 - c. Menerima dan memproses pelaporan penerimaan gratifikasi yang masuk kategori gratifikasi dalam kedinasan;
 - d. Menerima dan meneruskan pelaporan penerimaan gratifikasi yang tidak termasuk dalam kategori gratifikasi dalam kedinasan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

- e. Melaporkan penerimaan dan hasil penanganan pelaporan, penerimaan, gratifikasi secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- f. Menerima dan memproses laporan dugaan penerimaan gratifikasi oleh pegawai Sekretariat Lembaga Sensor Film bersama-sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- g. Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat menyurat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka penerapan system pengendalian gratifikasi di Sekretariat Lembaga Sensor Film;
- h. Melaporkan perkembangan dan analisis atas penerapan sistem pengendalian gratifikasi secara berkala kepada pimpinan instansi;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi mengenai efektifitas system pengendalian gratifikasi bersama-sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- KETIGA : Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG) pada Sekretariat Lembaga Sensor Film bertugas membangun Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Lembaga Sensor Film.
- KEEMPAT : Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG) pada Sekretariat Lembaga Sensor Film dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Lembaga Sensor Film.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Lembaga Sensor Film, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2024 yang relevan.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Lembaga Sensor Film ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal April 2023
Sekretaris LSF,

M. Sanggupri
NIP 197005021995121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS LEMBAGA SENSOR FILM,
NOMOR 1461/K1/WS.01.00/2023
TENTANG PENETAPAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
(TPG) PADA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (TPG)
PADA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Muhammad Nurhasim	Pegawas Hasil Penyensoran	Ketua
2.	Sofyan Hadi	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretaris
3.	Intan Rukma Isriana	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
4.	Octaviana Atiek Sulistyani	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Anggota
5.	Mahdi Shiddieqy Setatama	Pengawas Hasil Penyensoran	Anggota

Sekretaris LSF,

M. Sanggupri

NIP 197005021995121001